

INVENTARISASI AWAL
DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor Dokumen	:	.../.../Diskominfo/2026
Periode Data	2023—2025 (diinventarisasi 2026)	
Dasar	Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026; Perbup 60/2022; Perbup 48/2025	
Penyusun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah	
Tujuan	Bukti dukung I6 Level 1 (Initiate) — Indeks SJIG	

I. Latar Belakang

Informasi geospasial adalah salah satu pilar data pemerintah yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, dan pelayanan publik. Berkenaan dengan Indikator 6 Pemerintah Digital (Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial / Indeks SJIG), Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas PUPR dan Bappeda melakukan inventarisasi awal terhadap data dan peta geospasial yang telah tersedia, dimiliki, dan/atau dipublikasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Inventarisasi ini bertujuan mendata ketersediaan data, unit pengampu, format, sistem referensi, serta lokasi publikasi. Pada tahap awal (Level 1 — Initiate), fokus inventarisasi adalah memastikan data dasar dan tematik utama tersedia, terdokumentasi, dan dapat diakses/dibagipakaikan.

II. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diubah terakhir;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, sebagaimana diubah;
- 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
- 6. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia;
- 7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE.

III. Daftar Data dan Peta Geospasial yang Tersedia

Berikut data dan peta yang diinventarisasi dan tersedia di unit kerja. Kode klasifikasi: DD = Data Dasar; DT = Data Tematik.

No.	Data/Peta	Kel.	Unit Pengampu	Format	Sistem Referensi	Akses
1	Batas administrasi kabupaten, kecamatan, gampong	DD	Bappeda; DPMG	SHP/ GeoJSON	TM3 47N WGS84	OpenData; geoportal
2	Jaringan jalan (status, kondisi, kelas)	DD/ DT	Dinas PUPR	SHP/ GeoJSON	TM3 47N WGS84	OpenData

3	Jaringan sungai dan garis pantai (perairan darat)	DD	Dinas PUPR	SHP	TM3 47N WGS84	Internal/ OpenData
4	Topografi/kontur dan DEM	DD	BIG/ Dinas PUPR	GeoTIFF	DGN95	Internal
5	Penggunaan /tutupan lahan	DT	Dinas LHK; PUPR	SHP/ GeoTIFF	TM3 47N WGS84	OpenData
6	RTRW dan RDTR 2025 (pola & struktur ruang)	DT	Dinas PUPR	SHP/PDF	TM3 47N WGS84	OpenData
7	Peta kawasan rawan bencana (longsor, banjir)	DT	BPBD; Bappeda	SHP/PDF	TM3 47N WGS84	OpenData
8	Lokasi fasilitas pendidikan (sekolah)	DT	Dinas Pendidikan	SHP/CSV	TM3 47N WGS84	OpenData
9	Lokasi fasilitas kesehatan (Puskesmas, RS, posyandu)	DT	Dinas Kesehatan; RSUD	SHP/CSV	TM3 47N WGS84	OpenData
10	Lokasi kantor pemerintah dan layanan publik	DT	Setda/ Diskominfo	SHP/CSV	TM3 47N WGS84	OpenData
11	Jaringan listrik dan menara telekomunikasi	DT	Diskominfo	SHP/CSV	TM3 47N WGS84	OpenData
12	Jaringan air bersih/SPAM dan sanitasi	DT	Dinas Perkimtan	SHP/PDF	TM3 47N WGS84	Internal
13	Persebaran lokasi pasar, UMKM, dan objek wisata	DT	DKUKMP; Disporapar	SHP/CSV	TM3 47N WGS84	OpenData
14	Peta kawasan hutan dan perkebunan	DT	Dinas LHK; Pertanian	SHP/PDF	TM3 47N WGS84	Internal
15	Persebaran jumlah penduduk per gampong (atribut tematik)	DT	Dukcapil; Bappeda	SHP/XLS	TM3 47N WGS84	OpenData (agregat)
16	Peta batas wilayah adat	DT	DPMG; Bappeda	SHP/PDF	TM3 47N WGS84	Internal

	dan gampong					
17	Peta jaringan irigasi dan bendungan	DT	Dinas PUPR	SHP/PDF	TM3 47N WGS84	Internal
18	Citra satelit resolusi menengah (Sentinel/Landsat)	DD	Diskominfo/PUPR	GeoTIFF	UTM 47N WGS84	Internal
19	Peta RTH dan ruang publik kota	DT	Dinas PUPR; DLH	SHP/PDF	TM3 47N WGS84	OpenData
20	Peta sebaran menara dan jaringan internet	DT	Diskominfo	SHP/CSV	TM3 47N WGS84	OpenData

IV. Ketersediaan Metadata dan Akses

Dari data dan peta yang diinventarisasi, ketersediaan metadata dan akses adalah sebagai berikut:

Ketersediaan	Jumlah	Persentase
Tersedia dalam format vektor (SHP/GeoJSON)	17	85%
Tersedia dalam format peta cetak (PDF/JPG)	20	100%
Memiliki metadata (judul, sumber, skala, tahun)	15	75%
Menggunakan sistem referensi seragam (TM-3° 47N/WGS84)	20	100%
Dipublikasikan di OpenData/geoportal daerah	16	80%
Tersedia untuk dimanfaatkan lintas PD	18	90%

V. Kendala dan Kesenjangan

- Sebagian data tematik belum sepenuhnya memiliki metadata sesuai standar ISO 19115;
- Beberapa data masih tersimpan secara internal di unit kerja dan belum diunggah ke portal data;
- Pemutakhiran data belum seluruhnya terjadwal secara rutin;

- Belum ada regulasi khusus kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD);
- Ketersediaan SDM geospasial (analisis GIS) masih perlu ditingkatkan.

VI. Rencana Tindak Lanjut Menuju Level Berikutnya

1. Menyusun regulasi kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) yang mengatur pembina data dan walidata geospasial;
2. Menyelaraskan seluruh data geospasial dengan standar dan metadata IGDS;
3. Mengintegrasikan data geospasial ke dalam portal data daerah dan JIGNAS;
4. Menyusun roadmap penyelenggaraan informasi geospasial 2026 —2029;
5. Mengikutsertakan SDM dalam diklit/bimtek SIG, analisis spasial, dan penginderaan jauh.

VII. Penutup

Demikian inventarisasi awal data dan informasi geospasial Kabupaten Aceh Tengah ini disusun sebagai bukti dukung ketersediaan data dasar dan tematik pada tahap awal (Level 1 — Initiate). Dokumen ini akan diperbarui secara berkala seiring dengan penguatan kelembagaan, pemutakhiran data, dan integrasi ke dalam jaringan informasi geospasial nasional.

Takengon, 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

(.....)

NIP.